

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR HARTA MANDIRI  
TAHUN 2023**



**JL. Ir. H. Juanda No.11 Pekanbaru  
TELEPON: (0761) 856756, (Hunting),32656**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan Berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Adapun penjelasannya sebagaimana akan dibahas pada laporan ini.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Harta Mandiri disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR tanggal 10 Maret 2016, POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/S Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLO). Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR tanggal 14 Desember 2020.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	JANSEN LINGGA
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan Perundang-undangan. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1) Fungsi audit intern; 2) Fungsi manajemen risiko; dan 3) Fungsi kepatuhan 5. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Audit Internal, Audit Eksternal, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang telah ditentukan. 8. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat Strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada. 9. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan 10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 11. Wajib untuk memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi			
2.	Nama	:	ALI SYAHBANA
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan Perundang undangan. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1) Fungsi audit intern; 2) Fungsi manajemen risiko; dan 3) Fungsi kepatuhan 5. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Audit Internal, Audit Eksternal, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan			

atau lainnya.

6. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang telah ditentukan.
8. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat Strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada.
9. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan
10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
11. Wajib untuk memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pencapaian Rencana Bisnis Bank seperti:

1. Memaksimalkan teknologi digital marketing
2. Berinovasi untuk produk- produk PT. BPR Harta Mandiri seperti tabungan, deposito dan kredit
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. meningkatkan daya saing melalui perbaikan pelayanan nasabah
5. memaksimalkan potensi pasar/usaha yang ada di daerah pekanbaru dan sekitarnya

Penjelasan Lebih Lanjut :

PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	SIM ENG LIAN
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas &amp; tanggungjawab Direksi.</li> <li>3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li> <li>4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/</li> </ol>			

	atau otoritas lainnya.	
	6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:	
	a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau	
	b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;	
2.	Nama	: SUAINIE
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :	
	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	
	2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi.	
	3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	
	4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:	
	a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan	
	b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	
	5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
	6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:	
	a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau	
	b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	Melakukan kunjungan dan meminta pelaporan pencapaian target dan realisasi serta tindakan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk pencapaian Rencana Bisnis Bank	
	Penjelasan Lebih Lanjut :	
	PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk melaksanakan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.	

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit

	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak Memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi	

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR Tidak memiliki Formulir Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR Tidak memiliki Formulir Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JANSEN LINGGA	Rp800.000.000	10%
2.	ALI SYAHBANA	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direktur utama memiliki saham 10%, sedangkan direktur operasional tidak			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JANSEN LINGGA	-	-	0%
2.	ALI SYAHBANA	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JANSEN LINGGA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ALI SYAHBANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga
-----	--------------	-------------------

		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JANSEN LINGGA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ALI SYAHBANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi pada BPR tidak memiliki Hubungan Keluarga				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SIM ENG LIAN	Rp3.200.000.000	40%
2.	SUAINIE	Rp4.000.000.000	50%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR			
1. Suainie persentase kepemilikan saham sebesar 50%			
2. Sim Eng Lian persentase kepemilikan saham sebesar 40%			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SIM ENG LIAN	-	-	0%
2.	SUAINIE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	SIM ENG LIAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUAINIE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :
Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	SIM ENG LIAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUAINIE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keluarga pada BPR				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp426.000.000	2	Rp216.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp142.562.400	2	Rp18.000.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp568.562.400		Rp234.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi bagi Direksi total tahun 2023 sebesar Rp 426.000.000,- dan Dewan Komisaris total tahun 2023 sebesar Rp. 216.000.000,-. Paket Remunerasi Berupa Tunjangan bagi Direksi total tahun 2023 sebesar Rp 142.562.400,- dan Paket Remunerasi Berupa Tunjangan Dewan Komisaris total tahun 2023 sebesar Rp. 18.000.000,-					

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan Kesehatan (2), Uang Purnabakti (2)	Uang Purnabakti (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
1. Fasilitas Tunjangan Kesehatan bagi direksi ditahun 2023 sebesar Rp. 797.840 ,- 2. Fasilitas Uang Purnabakti bagi direksi ditahun 2023 sebesar Rp. 64.000.000,- 3. Fasilitas Uang Purnabakti bagi Anggota Dewan Komisaris ditahun 2023 sebesar Rp.36.000.000,-			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.09 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.48 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.11 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.42 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
-----	---------------	----------------	-------------------------

1.	21 Maret 2023	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan</li> <li>2. Pengesahan Laba Rugi Tahun Buku 2022</li> <li>3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023</li> </ol>
2.	21 Maret 2023	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari laporan keuangan sampai dengan 28 Februari 2023 baki debit kredit mengalami penurunan, Dimana pada akhir tahun 2022 sebesar Rp. 21,502,868,814 sedangkan pada akhir february 2023 turun menjadi Rp. 20.275.406.386,-.</li> <li>2. Membahas hasil laporan keuangan Audit KAP tahun buku2022.</li> <li>3. Proses penyaluran kredit agar dilakukan percepatan namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.</li> <li>4. Outstanding kredit bermasalah mengalami kenaikan , dan NPL juga mengalami kenaikan. Dimana pada akhir tahun 2022 Outstanding kredit bermasalah sebesar 1.589.405.966 dengan NPL Kredit bermasalah sebesar 7.39 % sedangkan pada akhir february 2022 Outstanding kredit bermasalah naik menjadi 2.286.804.104. dengan NPL Kredit bermasalah sebesar 11.28 %.</li> <li>5. Membahas tentang perubahan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik ( sak etap ) menjadi standar akuntansi keuangan entitas privat ( sak ep ) yang akan berlaku tanggal 1 januari 2025</li> </ol>
3.	27 Juni 2023	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengacu kepada POJK No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat yaitu BPR harus memiliki Anggaran Dasar yang memenuhi persyaratan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan ini PT. BPR Harta Mandiri menunjuk Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Harta Mandiri adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sim Eng Lian</li> <li>b. Suainie</li> </ol> </li> <li>2. Memberikan kuasa kepada ketua rapat selaku Direktur Utama Perseroan untuk menuangkan hasil keputusan rapat ini di hadapan notaris.</li> </ol>
4.	27 Juni 2023	3	<p>Hasil Keputusan Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi / menetapkan Kebijakan Strategis dan Kinerja PT. BPR Harta Mandiri <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pembahasan mengenai kredit bermasalah, NPL tahun 2023 secara persentase memburuk dibandingkan beberapa bulan terakhir sampai tanggal 31 Mei 2023 rasio NPL sebesar 19.39 % , NPL dari BPR Harta Mandiri masih belum berhasil diturunkan sesuai target NPL bulan Mei 2023 yaitu sebesar 3.80 %. Progress penyelesaian terhadap kredit bermasalah dimaksud masih minim, tercermin dari peningkatan rasio NPL.</li> <li>b) Kredit yang diberikan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp 20,027,185,722.- BPR Harta</li> </ol> </li> </ol>

			<p>Mandiri masih belum berhasil mencapai target kredit yang diberikan bulan Mei 2023 yaitu sebesar Rp 24.372.326.354,- Direksi diminta perhatiannya agar Meningkatkan upaya pencapaian target pada tahun 2023 agar target dapat tercapai.</p> <p>c) Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) posisi 31 Mei 2023 sebesar Rp. 14.203.065.624,- dari target RBB sebesar Rp. 15.006.683.460,- belum dapat tercapai sesuai target. Selain itu DPK masih didominasi oleh dana mahal (deposito) posisi 31 Mei 2023 sebesar Rp. 11,308,187,540, -. Terhadap hal tersebut, BPR perlu menyesuaikan strategi penghimpunan dana murah agar lebih efektif.</p> <p>d) Untuk pencairan kredit agar lebih prudent dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta ketentuan yang berlaku.</p> <p>e) Laba pada 31 Mei 2023 sebesar Rp 679,919,512,- BPR Harta Mandiri masih belum berhasil mencapai target laba Mei 2023 yaitu sebesar Rp 800.343.056,- agar pencapaian target laba tetap diperhatikan .</p> <p>2. BPR Harta Mandiri menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara efektif . PE APU PPT dalam waktu dekat akan memberikan pelatihan tentang Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang disingkat dengan APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai.</p>
5.	10 Agustus 2023	4	Agenda Rapat : Menyetujui biaya pelatihan dan pendidikan Direksi dan Komisariss PT. BPR Harta Mandiri.
6.	05 September 2023	4	<p>A. Agenda Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui tambahan 3 hari cuti di tahun 2023 bagi Direktur PT. BPR Harta Mandiri.</li> <li>Menyetujui penggantian biaya makan dan minum jika diperlukan dan penggantian biaya makan dan minum dalam melaksanakan kegiatan kunjungan kerja keluar kota Pekanbaru.</li> </ol> <p>B. Hasil Keputusan Rapat Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh peserta rapat bersepakat untuk menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tambahan 3 hari cuti di tahun 2023 bagi Direksi PT. BPR Harta Mandiri.</li> </ol> <p>Sehubungan dengan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 oleh pemerintahan melalui surat keputusan bersama 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri</p>

			<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2023. Adapun Cuti Bersama Tahun 2023 sebanyak 11 hari. Dan di dalam ketentuan PT. BPR Harta Mandiri Cuti bersama memotong jatah cuti tahunan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka PT.BPR Harta Mandiri Menyetujui tambahan 3 ( tiga ) hari cuti di tahun 2023 bagi Direksi.</p> <p>2. Menyetujui besaran penggantian biaya makan dan minum jika diperlukan dan besaran penggantian biaya makan dan minum melaksanakan kegiatan kunjungan kerja keluar kota Pekanbaru yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada jam kerja harian sebagai berikut</p> <p>Tujuan Jumlah Maksimal  penggantian biaya makan dan minum (jika diperlukan) Rp 30.000,-  penggantian biaya makan dan minum (jika kerja dalam hal kunjungan kerja keluar Kota) Rp 40.000,-</p>
7.	05 September 2023	3	<p>Hasil Keputusan Rapat:</p> <p>1. Melakukan evaluasi / menetapkan Kebijakan Strategis dan Kinerja PT. BPR Harta Mandiri</p> <p>a) NPL tahun 2023 secara persentase masih jauh dari target. Sampai tanggal 31 Agustus 2023 rasio NPL sebesar 15.70 % dengan jumlah baki debit kredit bermasalah sebesar 3.422.223.595, NPL dari BPR Harta Mandiri masih belum berhasil diturunkan sesuai target NPL bulan Agustus 2023 yaitu sebesar 3.08 %. Progress penyelesaian terhadap kredit bermasalah dimaksud masih minim, tercermin dari peningkatan rasio NPL.</p> <p>b) Kredit yang diberikan pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar 21,791,625,556.- BPR Harta Mandiri masih belum berhasil mencapai target kredit yang diberikan bulan Agustus 2023 yaitu sebesar 26.422.326.354,- Direksi diminta perhatiannya agar Meningkatkan upaya pencapaian target pada tahun 2023 agar target dapat tercapai.</p> <p>c) Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) posisi 31 Agustus 2023 sebesar 17.613.432.576,- dari target RBB sebesar 15.698.916.460,- telah dapat tercapai diatas target. namun DPK masih didominasi oleh dana mahal (deposito) posisi 31 Agustus 2023 sebesar 13,878,236,619, -. Terhadap hal tersebut, BPR perlu menyesuaikan strategi penghimpunan dana murah agar lebih efektif.</p> <p>d) Untuk pencairan kredit agar lebih prudent dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta ketentuan yang berlaku.</p> <p>e) Laba pada 31 Agustus 2023 sebesar 1,006,619,623,- BPR Harta Mandiri masih belum berhasil mencapai target laba Agustus 2023 yaitu sebesar 1.509.321.304,- agar pencapaian target laba tetap diperhatikan .</p> <p>2. Membahas tentang perubahan standar</p>

			<p>akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik ( sak etap ) menjadi standar akuntansi keuangan entitas privat ( sak ep) dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai ( ckpn ) yang akan berlaku tanggal 1 januari 2025.</p> <p>3. PT. BPR Harta Mandiri merencanakan akan membuka kantor kas di tahun 2024, untuk itu PT. BPR Harta Mandiri akan melakukan persiapan pembukaan kantor kas</p>
8.	05 Desember 2023	3	<p>A. Agenda rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan Menetapkan Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB) Tahun 2024</li> <li>2. Membahas tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)</li> </ol> <p>B. Hasil Keputusan Rapat</p> <p>Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan seluruh peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh Dewan Komisaris bersepakat untuk menyetujui dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target outstanding penyaluran kredit sampai dengan Desember 2024 di proyeksikan sebesar Rp. 28,07 milyar;</li> <li>2. Target outstanding penghimpunan dana dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tabungan sampai dengan Desember 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 4.75 milyar;</li> <li>b. Deposito sampai dengan Desember 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 15.27 milyar;</li> </ol> </li> <li>3. Target NPL sampai dengan Desember 2024 sebesar 2.36%;</li> <li>4. Target Aset sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp 36.65 milyar;</li> <li>5. Target Laba Usaha sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp 2.10 milyar</li> <li>6. Secara keseluruhan semua target yang ada dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2024</li> <li>7. Membahas tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)</li> </ol> <p>Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2024. Kategori kegiatan usaha berkelanjutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan sebesar Rp. 1 milyar;</li> <li>b. Kegiatan UMKM sebesar Rp. 2,16 milyar</li> </ol>
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	SIM ENG LIAN	8	0	100%
2.	SUAINIE	8	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris Selalu hadir saat rapat				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	4	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Penjelasan Lebih Lanjut</b>		
Terdapat 2 Permasalahan Hukum Perdata yang Dihadapi tahun 2022 yaitu		
1. Debitur an. Ade Visusri		
2. Debitur an. Desi Yelinda		
3. Debitur an. Rini Widiantari		
4. Debitur an. Indra Koh		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>							
Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	09 Februari 2023	Sosial	Sumbangan untuk khitanan anak nita andriani	Sumbangan untuk khitanan anak nita andriani	Rp500.000
2.	25 Mei 2023	Sosial	Sumbangan doorprice untuk hari BPR BPRS	Perbarindo Riau	Rp489.800
3.	25 Mei 2023	Sosial	Sumbangan dana sponsor untuk waisak	Sumbangan dana sponsor untuk waisak	Rp2.000.000
4.	05 Oktober 2023	Sosial	Bantuan dana kontigen stg	Bantuan dana kontigen stg	Rp2.000.000

5.	11 Oktober 2023	Sosial	Bantuan dana pembangunan gereja	Gereja	Rp2.000.000
6.	05 Desember 2023	Sosial	Sumbangan untuk dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak hut dharma wanita	Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak	Rp2.000.000

**Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial PT. BPR Harta Mandiri tahun 2023 yaitu:

1. Sumbangan untuk khitanan anak nita andriani
2. Sumbangan doorprice untuk hari BPR BPRS
3. Sumbangan dana sponsor untuk waisak
4. Bantuan dana kontigen stg
5. Bantuan dana pembangunan gereja
6. Sumbangan untuk dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak hut dharma wanita

### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Harta Mandiri
Alamat	: JL. Ir. H. Juanda No.11 Pekanbaru
Nomor Telepon	: (0761) 856756, (Hunting),32656
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp12.864.725.895
Total Aset	: Rp32.935.967.040

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Harta Mandiri Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.00	0.200
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.06	0.159
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.00	0.100
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.00	0.100
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.13	0.113
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.00	0.100
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.00	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.00	0.075
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.000</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1)**

- a. BPR Harta Mandiri telah memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan untuk anggota Direksi
- b. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan & Keputusan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- c. Direksi BPR Harta Mandiri telah menjalankan tugas & tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan dan telah dipertanggungjawabkan dengan Dewan Komisaris dalam RUPS
- d. Direksi BPR Harta Mandiri telah menerapkan pelaksanaan Tata Kelola

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.06)**

- a. BPR Harta Mandiri telah memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan untuk anggota Dewan Komisaris.
- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan & Keputusan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- c. Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri telah menjalankan tugas & tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

PT. BPR Harta Mandiri tidak memiliki Tugas atau Fungsi Komite

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)**

- a. BPR Harta Mandiri telah memiliki kebijakan yang berkaitan dengan Penanganan Benturan Kepentingan
- b. Selama tahun 2023, di lingkungan internal BPR Harta Mandiri baik pada level top manajemen hingga sampai pada level pelaksana, belum terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1)**

- a. BPR Harta Mandiri telah memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan sebagai pelaksana Fungsi Kepatuhan.
- b. Fungsi kepatuhan telah menerapkan pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditentukan

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.13)**

- a. BPR Harta Mandiri telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Audit Internal
- b. Fungsi Audit Internal telah menerapkan pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditentukan

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

- a. Sampai dengan berakhirnya tahun 2023
- b. Audit Laporan Keuangan telah dilakukan oleh pihak Auditor Eksternal yaitu oleh Akuntan

Publik, dan Laporan hasil Audit Akuntan Publik telah disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1)**

BPR Harta Mandiri telah memiliki Penerapan Manajemen Risiko

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**

- a. BPR Harta Mandiri telah memiliki kebijakan tertulis yang berkaitan dengan BMPK sebagai pedoman dalam pelaksanaan.
- a. Dalam realisasinya, belum terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Pelanggaran dan/ atau Pelampauan BMPK

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)**

- a. Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
- b. Konsep penyusunan Rencana Bisnis BPR Harta Mandiri telah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)**

- a. BPR Harta Mandiri telah memiliki system pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dan tenaga SDM yang memadai sebagai pelaksanaannya.
- b. Telah melakukan penyusunan dan penyampaian pelaporan wajib BPR sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Sangat Baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, baik struktur dan infrastruktur tata kelola. Secara umum proses penerapan dan hasil penerapan tata kelola secara umum tidak mendapatkan adanya permasalahan dan kelemahan. BPR Harta Mandiri akan selalu berupaya untuk mempertahankan kinerja agar hasil penilaian self assessment selalu berada pada peringkat Sangat Baik .

Pekanbaru, 16 Januari 2024

PT. BPR Harta Mandiri

  
**Jansen Lingga**  
Direktur Utama

**BPR HARTA MANDIRI**

  
**Sim Eng Lian**  
Komisaris Utama